

**DAFTAR BACAAN**

- Eri Setianto Kurniawan, Bambang Pudjianto, dan Y.I. Wicaksono, Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang), *Jurnal Teknik*, Vol. 30, No 3, 2009.
- Sri Suwitri, Eny Rachyuningsih, Cahyo Sasmito, Pelayanan Publik: Public Private Partnership Percepatan Infrastruktur di Indonesia 2005-2009, "Dialogue" *JIAKP*, Vol. 2, No. 3, September 2005.
- Lalu Hadi Adha, Kontrak Build Operate Transfer sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah dengan Pihak Swasta, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011.
- Suryadi, Analisa Hukum terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, *Jurnal Selat*, vol. 1 no. 2, 2014.
- Abdul Kadir, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Malang, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- I Gede Abdhi Prabawa, 'Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Build Operate And Transfer Untuk Melindungi Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Menunjang Sektor Pariwisata', *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013*, Universitas Brawijaya Malang.
- Advendi dan Elsi Kartika S., *Hukum dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
- BW Terjemahan Subekti dan Tjotrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Padnya Paramita*, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk  
Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik  
Negara/Daerah